

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Hubungan agensi merupakan otak antara prinsipal dan agen dimana prinsipal dalam hal ini shareholder (pemegang saham) mendelegasikan pertanggung jawaban atas *decision making* atau tugas tertentu kepada agen (*manager*) sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi dalam internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Oleh karena itu, manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Agency cost adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah keagenan dan memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Hubungan antara pemegang saham yang memiliki saham publik dan manajer yang menjalankan perusahaan tersebut merupakan salah satu contoh dari hubungan yang mengakibatkan *agency cost*. Eisenhardt (1989) menyatakan ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu : (1) Manusia pada umumnya memntingkan diri sendiri (*self-interest*), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk-averse*)

Shareholder mendelegasikan pembuatan keputusan sehari-hari kepada manajer. Salah satu tugas manajer adalah mengawasi sumber-sumber ekonomi perusahaan. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Hal ini memicu terjadinya konflik keagenan sehingga diperlukan pihak ketiga yang bersifat independen sebagai mediator antara dua kepentingan. Auditor dipandang sebagai pihak independen yang dianggap mampu menjembatani kepentingan prinsipal dan agen dalam melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal melalui sebuah sarana yaitu laporan keuangan.

Auditor bertugas untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya serta mengungkapkannya pada laporan audit (SPAP, 2011).

2.1.2 *Signaling Theory*

Teori sinyal menerangkan bahwa sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. *Signaling Theory* menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

Integritas informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan sebaiknya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat

keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis. Dalam *signaling theory*, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan.

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Memberikan sinyal pada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang merupakan salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri (Wolk et all, 2001).

Signaling theory juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*principal*) dan pihak eksternal perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Opini dari pihak lain (*independen*) yang diberikan kepada perusahaan tentang laporan keuangan diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan oleh pihak perusahaan.

2.1.3 Auditing

Ada beberapa pengertian auditing (pemeriksaan akuntansi) yang diberikan oleh beberapa sarjana di bidang akuntansi, antara lain:

1. Menurut Konrath (2005) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menurut Alvin A. Arens, Marks. Beasley, (2003:11): “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*”

2.1.4 Financial Distress

Kesulitan keuangan (*financial distress*) dapat didefinisikan sebagai suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan selama periode tertentu yang digambarkan dengan mengalami laba bersih (*net profit*) negatif selama beberapa tahun yang akhirnya akan mengarah ke kebangkrutan (Ross et al., (2002) dalam Fitrianasari dan Januarti (2008)). Mc Keown (1991) dalam Januarti (2009) mengemukakan perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), auditor tidak pernah memberikan opini audit *going concern*. Sebaliknya, semakin memburuk atau terganggu kondisi perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*.

Pada perusahaan yang kondisinya buruk, banyak ditemukan indikator masalah *going concern*. Manajemen sering dihadapkan pada kegagalan dalam membesarkan perusahaan. Akibatnya kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan ke depan tidak jelas. Perusahaan menjadi tidak sehat atau sakit, bahkan berkelanjutan mengalami krisis yang berkepanjangan. Kondisi ini dapat mengakibatkan kearah kebangkrutan atau likuidasi ataupun insolvabilitas. Kebangkrutan (*bankruptcy*) diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba (Supardi dan Mastuti, 2003 dalam Ramadhany, 2004).

Ramadhany (2004) dalam Santosa dan Wedari (2007) mengemukakan bahwa kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan kenyatannya. Pada perusahaan yang sakit banyak ditemukan indikator masalah *going concern*. Kondisi ini digambarkan dari rasio keuangan yang dapat memberikan indikasi apakah perusahaan dalam kondisi baik (sehat) atau dalam kondisi buruk (sakit). Perusahaan yang baik (sehat) mempunyai profitabilitas yang besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang sewajarnya sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar dibandingkan dengan jika profitabilitasnya rendah (Petronela, 2004 dalam Santosa dan Wedari, 2007). Kondisi perusahaan diukur dengan menggunakan Revised Altman Model (1993). Model yang dikembangkan sebelumnya mengalami revisi yang bertujuan agar model prediksi tersebut tidak hanya digunakan pada perusahaan manufaktur tetapi juga dapat digunakan pada perusahaan selain perusahaan manufaktur sektor

industri Tekstil dan Garment. Model Revised Altman (1993) adalah sebagai berikut:

$$Z' = 0.717Z_1 + 0.874Z_2 + 3.107Z_3 + 0.420Z_4 + 0.998Z_5$$

Z_1 = working capital / total asset

Z_2 = retained earnings / total asset

Z_3 = earnings before interest and taxes / total asset

Z_4 = book value of equity / book value of debt

Z_5 = sales / total asset

Berdasarkan nilai Z' tersebut, apabila nilai Z' diatas 2,9 maka perusahaan digolongkan sebagai perusahaan sehat dan diberi nilai 1; jika nilai Z' diantara 1,2 sampai dengan 2,9 maka kondisi perusahaan tidak diketahui sehat atau tidak dan diberi nilai 0; dan jika nilai dibawah 1,2 maka perusahaan digolongkan sebagai perusahaan tidak sehat dan diberi nilai -1 (altman 1968).

2.1.5 *Debt Default*

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default* (Januarti, 2009)

Menurut Chen dan Church (1992), *debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo terjadi.

PSA 30, menyatakan bahwa indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (default). Adanya status *debt default* dalam sebuah perusahaan dapat menjadi indikasi awal jika keadaan keuangan perusahaan kurang baik, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu melaksanakan kewajiban

Status *debt default* dilihat dari pernyataan auditor dalam laporan tahunan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan gagal membayar hutang dan bunganya.

2.1.6 Kualitas Audit

Kualitas audit telah didefinisikan dengan berbagai cara. Watkins et al. (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas audit. Di dalam literatur praktis, kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan. Di sisilain, peneliti akuntansi mengidentifikasi berbagai dimensi kualitas audit. Dimensi-dimensi yang berbeda-beda ini membuat definisi kualitas audit juga berbeda-beda. Ada empat kelompok definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins et al. (2004). Pertama, adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981b) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, adalah definisi yang

disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999). Kualitas audit menurut mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi yang diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beatty (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993). Menurut mereka, kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Terakhir, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bisa meningkatkan kemurnian (*fineness*) pada data akuntansi (Wallace, 1980 di dalam Watkins et al., 2004). DeAngelo (1981b) setuju dengan pendapat bahwa kualitas audit harus dilihat dari dua sisi: permintaan atau input atau berhubungan dengan pihak klien dan pasokan atau output atau berhubungan dengan pihak auditor.

De Angelo (1981) dalam Oktorina dan Suharli (2005) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditeenya. Kualitas audit dapat dilihat dari auditor industry specialization karena KAP yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi lingkungan serta risiko audit khusus industri tersebut sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Januarti, 2007). Peneliti lain juga mengungkapkan bahwa auditor dengan spesialisasi akan menghasilkan penghematan finansial dan kualitas audit yang lebih baik (Hogan dan Jeter, 1999, dalam Januarti, 2007). Pengukuran auditor industry specialization dari proporsi penjualan auditee yang diaudit terhadap penjualan pada industri yang sama.

O'Keefe (1994) juga berpendapat bahwa auditor *industry specialization* berhubungan positif dengan kualitas audit diukur dengan penilaian kepatuhan auditor terhadap GAAS. Apabila proporsinya lebih dari 15% dikatakan spesialis demikian pula sebaliknya (Craswell et al., 1995, dalam Januarti 2007).

Berdasarkan kompartemen akuntan publik Ikatan Akuntansi Indonesia yang dikutip oleh Rahmadhany (2004), berikut adalah nama-nama Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam The Big Four (mulai tahun 2002):

1. KAP Price Waterhouse, yang bekerja sama dengan KAP Haryanto Sahari dan rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja.
3. KAP Ernst dan Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantoro, Sarwoko dan Sandjaja.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan.

Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kategori perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big 4 diberi nilai dummy 1 dan kategori perusahaan yang menggunakan jasa selain KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 diberi nilai dummy 0.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan

sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston 2001).

Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan *inventory cotrolability* yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan (Mukhlisin, 2002).

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Mengklasifikasikan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Assets (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	50 juta – 500 juta	300 juta – 2 miliar
Usaha Menengah	10 juta – 10 miliar	2 miliar – 50 miliar
Usaha Besar	Diatas 10 miliar	Diatas 50 miliar

Menurut Setiyadi (2007), Ukuran Perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Sedangkan menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Maka pengukuran terhadap ukuran perusahaan dapat mengacu pada pendapat Riyanto dan juga mengacu pada undang-undang No.9 tahun 1995, dimana ukuran perusahaan diproxy dengan nilai logaritma natural dari total penjualan. Secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rumus:
$$Firm\ size = Ln\ Total\ Revenues$$

Dimana, *Firm Size* = Ukuran Perusahaan

Ln TR = Logaritma natural dari Total Penjualan

Atau dapat diproxy dengan nilai logaritma natural dari total asset sebagai berikut:

$$Firm\ Size = Ln\ Total\ Asset$$

Rumus:

Dimana, *Firm Size* = Ukuran Perusahaan

$\text{Ln Total Asset} = \text{Logaritma natural dari Total Asset}$

2.1.8 Opini Audit

Berdasarkan standar professional akuntan publik (SPAP) SA seksi 10, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Pernyataan pendapat atas kewajiban laporan keuangan perusahaan diungkapkan dalam laporan audit yang mencakup paragraf, kalimat, frasa, dan kata yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pemakai laporan audit. Laporan audit terdiri dari 3 paragraf antara lain: paragraf pengantar (*introductory paragraph*), paragraf lingkup (*scope paragraph*), dan daftar paragraf pendapat (*opinion paragraph*).

Opini audit dinyatakan pada paragraf pendapat yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Menurut standar profesional akuntan publik (PSA 29 SA seksi 58), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Dalam pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang

material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa penjas
(*unqualified opinion with explanatory Language*)

Saat keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjas (atau bahasa penjas lain) dalam laporan audit keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf meliputi:

- a) Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain
- b) Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI.
- c) Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula yang menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d) Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e) Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.

- f) Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh BAPEPAM namun tidak disajikan atau di-review.
- g) Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI-Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keragu-raguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
- h) Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:
- a) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit
- b) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak

material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Pernyataan tidak memberikan pendapat jika auditor tidak dapat melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.1.9 *Going Concern*

Going concern merupakan kelangsungan hidup entitas. Dengan adanya *Going Concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Apabila auditor merasa yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan maka auditor harus melakukan beberapa hal berikut ini, (SPAP, 2001): (1) memperoleh informasi rencana manajemen untuk mengurangi dampak tersebut, dan (2) menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut akan dilaksanakan. Jika manajemen tidak memiliki rencana maka auditor akan memberikan opini *disclaimer*.

Going Concern memberikan gambaran bahwa suatu entitas diharapkan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak diarahkan menuju kearah likuidasi. Maka suatu entitas akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta aktivitas-aktivasnya yang tidak berhenti. Suatu entitas dianggap *Going Concern* apabila perusahaan dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya. Keraguan besar terhadap *Going Concern* perusahaan terjadi apabila perusahaan melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya dengan menjual asset dalam jumlah yang besar, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, merestrukturisasi hutang atau dengan kegiatan serupa yang lain.

2.1.10 Opini Audit *Going Concern*

Auditor bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti mengenai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan dengan cara memeriksa catatan akuntansi yang mendukung laporan tersebut. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka auditor dapat memberikan pendapatnya mengenai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Pendapat atau opini audit merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari laporan audit, dan laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan oleh auditor dalam memberikan Opini Audit. Pendapat atau Opini Audit yang diberikan oleh auditor melalui beberapa tahapan audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang seharusnya diberikan atas laporan keuangan auditee.

Laporan audit atas suatu laporan keuangan perusahaan dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut, salah satunya yaitu

investor. Laporan audit tersebut digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Selain sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, laporan ini juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara auditor dengan klien untuk mengetahui tentang keadaan perusahaan yang diauditnya.

Menurut SPAP (2011) Opini Audit *Going Concern* adalah Opini Audit yang dikeluarkan oleh auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Penelitian Junaidi dan Hartono (2010) menyebutkan bahwa seorang auditor mempertimbangkan penerbitan opini *Going Concern* jika ia menemukan alasan atas keraguan keberlangsungan suatu perusahaan berdasarkan pengujian. SPAP seksi 341 memberikan pedoman kepada auditor mengenai dampak kemampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap Opini Auditor sebagai berikut:

1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, auditor harus:
 - a) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjuk untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b) Menentukan apakah rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
2. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan yang tidak memiliki pendapat.

3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan bahwa efektifitas rencana tersebut, diantaranya:

- a) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian
- c) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, auditor memberikan pendapat tidak wajar.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut ini adalah table penelitiannya:

Eko. Budi Setyano, Indira Januarti, dan Faisal. (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern*”. Penelitian ini dilakukan terhadap laporan *auditee* manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 1997 sampai 2006, Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive*, dengan kriteria perusahaan

yang mengalami kerugian minimal 2 tahun selama tahun pengamatan (1997-2006) sebanyak 78 perusahaan. Hasil dari penelitian ini bahwa kualitas audit, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, dan penggunaan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman berpengaruh negative terhadap opini audit *going concern*, sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

Muthohiroh dan Nur Cahyonowati. (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit *Going Concer* oleh Auditor pada *Auditee*”. Penelitian ini dilakukan terhadap laporan *auditee* manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2013, Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive*, adapun kriteria khusus yaitu perusahaan yang laporan keuangannya dipublikasikan di www.idx.co.id selama periode pengamatan 2011-2013 dan perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan satuan mata uang rupiah selama metode penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa hasil pengujian simultan (Bersama-sama) menunjukkan bahwa perkara pengadilan, audit *client tenure* reputasi auditor, *disclosure*, *debt default*, *opinion shopping* dan audit lag, berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*, yaitu sebesar 82%, sedangkan audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

Rahman dan Siregar (2012) meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit *Going Concer* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Sampel pada perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun

2006-2010. Hasil pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan, kualitas audit, kondisi keuangan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*.

Santosa dan Wedari (2007) melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit *Going Concern*.” Sampel pada penelitian ini berjumlah 310 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode ini menggunakan uji regresi logistik untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut, dan hasilnya adalah bahwa kondisi keuangan dari kelima variabel yang diuji, hanya variabel kondisi keuangan, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya yang berpengaruh secara signifikan, sedangkan pertumbuhan perusahaan dan kualitas audit tidak berpengaruh.

Ramadhany (2004) meneliti tentang “Pengaruh Variabel Keberadaan Komite Audit, *Default* hutang, kondisi keuangan Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, dan Skala Auditor Terhadap Kemungkinan Penerimaan Opini Audit *Going Concern*.” Sampel dalam perusahaan ini yaitu 86 perusahaan manufaktur periode tahun 2000-2004 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan perusahaan yang mengalami *financial distress*. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi logistik. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel *default* hutang, kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Eko Budi Setyarno, Indira Januarti, dan Faisal (2006)	Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit <i>Going concern</i>	1.) Variabel dependen: opini audit <i>going concern</i> . 2.) Variabel independen: kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan perusahaan	1.) Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> , 2.) penggunaan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman berpengaruh negatif terhadap opini audit <i>going concern</i> , 3) opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit <i>going concern</i> , 4) pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .
2.	Muthahiroh dan Nur Cahyonowati (2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit <i>going concern</i> oleh auditor pada <i>auditee</i> .	1.) Variabel dependen: Opini audit <i>going concern</i> . 2.) Variabel independen: Perkara Pengadilan, Audit Client	1.) Pengujian simultan (bersama-sama) Perkara pengadilan, audit <i>client tenure</i> , reputasi auditor, <i>disclosure</i> dan

			<p><i>Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Disclosure, Opini audit tahun sebelumnya, Audit lag, Financial Distress, Debt to equity ratio</i></p>	<p>audit lag berpengaruh terhadap penerimaan opini <i>going concern</i>, yaitu sebesar 82% 2.) Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini <i>going concern</i>.</p>
3.	Rahman dan Siregar (2012)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	<p>1). Variabel Dependen: opini audit <i>going concern</i> 2). Variabel Independen: kualitas audit, kondisi keuangan opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan utang perusahaan.</p>	<p>1.) Pengujian menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan hutang perusahaan, berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i>. 2.) Kualitas audit, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan penerimaan opini audit</p>

				<i>going concern.</i> :
4.	Arga Fajar Santosa dan Linda Kusumaning Wedari (2007)	Faktor_Faktor Yang mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit <i>Going concern.</i>	1). Variabel Dependen: Penerimaan opini <i>going concern.</i> 2.) Variabel Independen: kualitas audit, kondisi keuangan opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan.	1.) Kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern.</i> 2.) Kualitas audit, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern.</i>
5	Alexander Ramadhany (2005)	Pengaruh Variabel Keberadaan Komite Audit, <i>Default</i> hutang, kondisi keuangan Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, dan Skala Auditor Terhadap Kemungkinan Penerimaan Opini Audit <i>Coing Concern.</i>	1). Variabel Independen: opini audit <i>going concern</i> 2.) Variabel independent: komite audit, <i>default</i> hutang, kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, skala auditor.	1.) Kondisi keuangan, <i>default</i> hutang dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern.</i> 2.) Komite audit, ukuran perusahaan, dan skala auditor tidak berpengaruh signifikan.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Financial Distress* dan Opini Audit *Going Concern*

Perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang sedang mengalami kondisi keuangan yang memburuk. Keadaan ini dapat tercermin dari rasio keuangan perusahaan yang terus menurun. Rasio-rasio ini yang dijadikan oleh beberapa peneliti untuk memprediksi kegagalan perusahaan yang akan bangkrut beberapa tahun kedepan (Altman 1984)

Altman dan McGough (1974) dalam Fanny dan Saputra (2005) menyarankan penggunaan model prediksi kebangkrutan sebagai alat bantu auditor dikarenakan memiliki tingkat prediksi kebangkrutan mencapai tingkat keakuratan 82% untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Setyarno, dkk (2006) dan Fanny dan Saputra (2005) penggunaan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman mempengaruhi ketepatan dalam pemberian opini audit dibandingkan jika menggunakan The Zmijeski model dan The Springate model untuk memprediksi keadaan *financial distress* perusahaan. *Financial distress* merupakan faktor perusahaan yang banyak dipakai untuk memprediksi *going concern* atau keberlangsungan hidup perusahaan dan kebangkrutan yang akan terjadi.

Mc Keown (1991) dalam Januarti (2009) mengemukakan bahwa perusahaan yang tidak pernah mengalami *financial distress*, auditor tidak pernah memberikan opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* (Z Score rendah) berpeluang mendapatkan opini

audit going concern dari auditor karena perusahaan tersebut mengindikasikan kelangsungan hidupnya diragukan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Ha 1: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*

2.3.2 Pengaruh *Debt Default* dan Opini Audit *Going Concern*

Indikator *going concern* yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*default*). *Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992)

Irfan dan Muid (2012), menjelaskan bahwa hal pertama yang akan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan adalah memeriksa hutang atau perjanjian serupa. Apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutang, maka akan muncul status *debt default*, dan saat itu pula kelangsungan hidup suatu perusahaan menjadi diragukan sehingga kemungkinan auditor akan memberikan opini audit *going concern*. Hal ini sesuai dengan penelitian Chen dan Church (1992) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara status *debt default* dengan kelangsungan hidup suatu entitas.

Sejalan dengan Chen dan Crunch (1992), penelitian Praptoni dan Januarti (2011), mendapatkan hasil bahwa *debt default* berpengaruh positif terhadap penerima opini audit *going concern*. Sebelumnya Januarti (2011) dan Ardiani,

DP, dan Azlina (2012) juga berhasil membuktikan bahwa status *debt default* pada suatu perusahaan akan mempengaruhi auditor dalam memberikan opini *going concern*. Maka konsisten dengan penelitian terdahulu.

Semakin besar hutang yang dimiliki suatu perusahaan akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian operasi, sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pokok dan bunga. Keadaan ini dapat menyebabkan perusahaan gagal dalam menjalankan usahanya, dan cenderung menerima opini audit *going concern*. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha 2: *Debt default* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*

2.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Opini Audit *Going Concern*

Kualitas audit yang baik akan menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karena itu, auditor bertanggungjawab untuk menyediakan jasa audit yang berkualitas. Auditor yang mempunyai kualitas audit yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit *going concern* apabila klien mengalami masalah keberlangsungan hidup.

De Angelo (1981) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Argumen tersebut berarti bahwa auditor skala besar

memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah *going concern* kliennya.

Mutchler *et al.* (1997) menemukan bukti univariat bahwa auditor *big 6* lebih cenderung menerbitkan opini audit *going concern* pada perusahaan yang mengalami *financial distress* dibandingkan auditor *non big 6*. Auditor skala besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding auditor skala kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going concern*. Semakin besar skala auditor, akan semakin semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha 3: Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan audit *going concern*.

2.3.4 Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern.

Menurut Kevin *et al.* (2006), perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan menunda untuk mengeluarkan opini audit *going concern* dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat mengatasi kondisi buruknya pada tahun mendatang.

Santosa dan Wedari (2007) juga melakukan penelitian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal tersebut didukung dengan penelitian

yang dilakukan oleh Ramadhany (2004), dan Alichia (2012). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

Perusahaan berskala besar cenderung memiliki keuangan yang kuat, dan didukung manajerial yang professional, oleh sebab itu auditor memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk bisa bertahan sampai waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

Ha 4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.



2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu financial distress, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu Opini Audit Going Concern sebagai berikut:

